



CLIMATE
POLICY
INITIATIVE

Desain Valuasi Sumberdaya Alam untuk Tingkat Kabupaten di Kalimantan Tengah

Leela Raina

Muhammad Ery Wijaya

Oktober 2016

Kertas Kerja CPI

Deskripsi

Sektor	Valuasi sumberdaya alam, peraturan tata guna lahan dan ruang, ekonomi lingkungan dan sumberdaya alam, valuasi jasa ekosistem
Region	Kalimantan Tengah, Indonesia
Kata kunci	Perhitungan valuasi sumberdaya alam, perencanaan tata ruang, manajemen tata guna lahan
Laporan CPI terkait	Penilaian Nilai Konservasi Tinggi di Provinsi Kalimantan Tengah Penggunaan Data untuk Mengoptimalkan Sumber Daya Lahan Indonesia
Hubungi	Muhammad Ery Wijaya ery.wijaya@cpiclimateline.org

Penghargaan

Penulis mengucapkan terima kasih atas kontribusi dan tinjauan dari rekan-rekan di CPI, yaitu Jane Wilkinson, Suzanty Sitorus, Tiza Mafira dan Arta Bramansa Ottay. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ari Murdimanto atas bantuan teknis terkait GIS untuk kepentingan penyusunan kertas kerja ini.

Para penulis telah memperoleh tambahan pengetahuan dari pertemuan dengan Kementerian Keuangan, Bank Dunia, dan tim penelitian dari Departemen Kehutanan, Universitas Palangka Raya: Dr. Ir. R.M. Sukarna, M.Si., Agung Wibowo, S.Hut., M.Si., Ph.D. dan Santosa Yulianto, S.Hut., M.Sc. Kertas kerja ini merupakan kelanjutan atas kegiatan penelitian pada pemetaan Nilai Konservasi Tinggi yang dipimpin oleh Ir. Bismart Ferry, M.Si., sebagai bagian dari Program Produksi-Protection Kalimantan Tengah (2013-2015). Kertas kerja ini didanai oleh Norwegian Development Agency (NORAD).

Tentang CPI

Climate Policy Initiative (CPI) berusaha memperbaiki kebijakan-kebijakan terpenting di seluruh dunia dalam bidang energi dan penggunaan lahan, dengan fokus utama di bidang pembiayaan. Sebagian dukungan dana hibah berasal dari Open Society Foundations, CPI bekerja di tempat-tempat yang paling berpotensi untuk memperoleh dampak dari perubahan kebijakan seperti Brasil, Cina, Eropa, India, Indonesia, dan Amerika Serikat.

Pekerjaan kami adalah membantu banyak negara untuk tetap bertumbuh sementara juga menangani sumber daya yang semakin langka dan risiko perubahan iklim. Hal ini merupakan tantangan yang kompleks dan kebijakan mempunyai peran yang sangat penting di dalamnya.

Didukung oleh

Palangka Raya Institute for Land and Agricultural Research (PILAR) adalah yayasan penelitian yang mendukung tenaga ahli, peneliti, dan mahasiswa lokal di Universitas Palangka Raya untuk melakukan analisis optimasi penggunaan lahan di Kalimantan Tengah.

PILAR memiliki fokus khusus untuk mendukung pengembangan kelapa sawit yang memiliki produktivitas tinggi dan berkelanjutan, dan melestarikan ekosistem yang berharga di Kalimantan Tengah. Hasil analisis PILAR digunakan untuk mengembangkan rekomendasi bagi pengambil kebijakan lokal dan investor bisnis.

Copyright © 2016 Climate Policy Initiative www.climatepolicyinitiative.org

All rights reserved. CPI welcomes the use of its material for noncommercial purposes, such as policy discussions or educational activities, under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License. For commercial use, please contact admin@cpisf.org.



1. Ringkasan Eksekutif

Lahan di Indonesia memberikan manfaat yang signifikan bagi ekonomi, usaha dan masyarakatnya. Beberapa manfaat tersebut, seperti produksi pertanian dan pertambangan, tercermin dalam nilai lahan. Namun manfaat lain tidak termasuk dalam biaya atau penilaian lahan meskipun manfaatnya penting, misalnya layanan penyediaan air, cadangan karbon serta habitat satwa liar. Kesenjangan tersebut menandakan bahwa ketika masyarakat, pemerintah, atau bisnis membuat keputusan tentang cara mengalokasikan atau menggunakan lahan, mereka melakukannya dengan pertimbangan yang tidak menyeluruh.

Tantangan demikian tampak jelas di Provinsi Kalimantan Tengah, yang merupakan provinsi terbesar ketiga di Indonesia dan rumah bagi sekitar 10% hutan Indonesia serta jaringan sungai yang mengalir ke Laut Jawa dan pegunungan Schwaner. Semua itu menjadikan Kalimantan Tengah rumah bagi keanekaragaman hayati flora dan fauna yang didukung oleh budaya Dayak yang kaya. Tekanan yang berkembang untuk meningkatkan produksi kelapa sawit telah menyebabkan deforestasi, yang mengancam keberlangsungan jasa-jasa penting yang dapat disediakan oleh lahan dan bermanfaat bagi masyarakat (Busch et al. 2015). Hal ini terjadi meskipun sejumlah besar lahan alternatif untuk perluasan kelapa sawit di wilayah tersebut tersedia, misalnya melalui konversi sekitar 3,3 juta hektar lahan terdegradasi yang sesuai (Gingold et al 2012).

Ada solusi yang menguntungkan semua bagi Kalimantan Tengah dan bagi Indonesia yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan perlindungan sumber daya alam sekaligus, yaitu dengan mengoptimalkan penggunaan lahan melalui kebijakan yang berdasarkan valuasi sumberdaya alam. Valuasi sumberdaya alam merupakan seperangkat alat yang digunakan di negara-negara besar di dunia yang memetakan nilai atas berbagai penggunaan lahan pada sebidang tanah, dengan memperhatikan serangkaian indikator sosial, lingkungan, dan ekonomi.

Meski demikian, valuasi lahan di Indonesia saat ini tidak secara menyeluruh mencerminkan nilai lahan dan sumber daya alam yang sebenarnya. Penilaian yang ada cenderung tidak mempertimbangkan nilai lahan dan layanan ekosistem serta tidak memperhitungkan semua variabel dan fungsi atas penggunaan lahan karena sulitnya mengakses data yang konsisten, terutama data spasial.

Misalnya, studi yang mengkaji skenario dengan proyeksi business-as-usual menunjukkan variasi nilai sumberdaya alam pada masa depan. Penilaian tersebut berkisar dari kerugian USD 72 per hektar per tahun akibat deforestasi, hingga keuntungan sebesar USD 91 per hektar per tahun melalui penjualan kayu dan jasa hutan serta pertanian lainnya. Demikian pula dalam menilai skenario pertumbuhan hijau, studi menunjukkan manfaat penilaian yang berkisar dari USD 17 hingga USD 816 per hektar per tahun. Sementara sebagian besar studi hanya mencakup variabel jasa penyediaan karbon dan produk hutan berupa kayu serta non-kayu, variabel seperti sumber pembangkit listrik tenaga air dan jasa penyediaan air lainnya tidak diperhitungkan karena keterbatasan data atau metode, terlepas dari hubungan nilai konservasi tinggi atau dampak atas kebijakan di lapangan (Berghofer et al 2016).

Meski peraturan terkait valuasi sumberdaya alam telah hadir, pemanfaatannya dalam proses pembuatan kebijakan di sektor tata guna lahan masih sangat terbatas. Saat ini, izin penggunaan lahan hutan tidak dikeluarkan atas dasar pedoman valuasi ekonomi ekosistem hutan yang diatur oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kementerian Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki peraturan dan pedoman penilaian sumberdaya alam yang saling bertentangan dan tidak konsisten, dengan tingkat kelengkapan yang bervariasi khususnya pada variabel terkait jasa ekosistem dan penyerapan karbon. Masih belum jelas peraturan mana yang perlu diutamakan, dan bagaimana penerbitan izin penggunaan hutan berkaitan dengan proses perencanaan tata ruang dan berkontribusi terhadap kebijakan dalam praktiknya.

Kajian ini dihasilkan oleh Climate Policy Initiative (CPI) dengan dukungan teknis dari Palangkaraya Institute for Land Use and Agricultural Research (PILAR) dan Universitas Palangkaraya (UPR), untuk meletakkan dasar valuasi sumberdaya alam di tingkat kabupaten dengan meninjau pemetaan dan peraturan yang ada, serta menggambarkan desain studi tersebut.

Ini adalah kali pertama suatu penilaian valuasi sumberdaya alam yang komprehensif dan berdasarkan kebutuhan dirancang berdasarkan pemetaan kawasan bernilai konservasi tinggi dan tinjauan peraturan pedoman untuk penilaian, penggunaan lahan, dan tata ruang. Saat penilaian selesai, nilai lahan yang sebenarnya di seluruh kabupaten akan diketahui, dan dapat dijadikan sebagai dasar untuk penilaian

penggunaan lahan lebih lanjut, dan membentuk dasar strategi pengelolaan yang mencerminkan peluang produksi dan perlindungan bagi sumber daya alam di Kalimantan Tengah.

Kami menemukan peluang untuk penilaian valuasi sumberdaya alam tingkat kabupaten di sejumlah kabupaten kunci, termasuk Seruyan, Katingan, Gunung Mas, dan Murung Raya. Namun, kami merekomendasikan studi lebih lanjut untuk fokus di Kabupaten Kotawaringin Timur. Sementara lebih dari setengah luas daratan Kalimantan Tengah akan mendapat manfaat dari pendekatan pengelolaan lahan yang lebih baik, Kotawaringin Timur memberikan kesempatan terbesar karena menunjukkan peluang baik untuk perkebunan kelapa sawit rendah emisi dan peningkatan produktivitasnya, serta perlindungan terhadap kawasan bernilai konservasi tinggi.

- Kotawaringin Timur memiliki kawasan bernilai konservasi tinggi terluas sebesar 27.502 hektar di antara semua kabupaten perkebunan, yaitu daerah yang saat ini telah memberikan izin perkebunan kelapa sawit. Namun, saat ini, Kotawaringin Timur hanya memiliki 2,89% dari luas daerah Kalimantan Tengah bernilai konservasi tinggi dengan status dilindungi, yaitu sebagai cagar alam dan hutan lindung. Angka tersebut merupakan yang terendah dibandingkan dengan kabupaten lainnya.
- Menurut catatan, Kotawaringin Timur memiliki laju deforestasi paling parah dari seluruh kabupaten berdasarkan analisis luas tutupan hutan dari tahun 1973 hingga 2012.
- Kotawaringin Timur juga memiliki kapasitas produksi terpasang dan konsentrasi pabrik kelapa sawit tertinggi (Seluruhnya 27 pabrik dengan kapasitas terpasang untuk pengolahan sebesar 1.585 ton Tandan Buah Segar/jam) dan pabrik kernel

(Seluruhnya 4 pabrik dengan kapasitas produksi 39,5 ton kernel/jam).

- Hampir 48.839 hektar kawasan bernilai konservasi tinggi yang teridentifikasi di Kotawaringin Timur berisiko terkena perluasan kebun kelapa sawit. Daerah ini berada di bawah status hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) sehingga memungkinkan untuk penggunaan lain, seperti penerbitan izin untuk perkebunan kelapa sawit. HPK akan menjadi penting, terutama untuk membuat skenario penilaian penggunaan lahan sebagai hutan dibandingkan kebun kelapa sawit. Ada peluang signifikan di tingkat kabupaten untuk perluasan kebun kelapa sawit beremisi rendah di lahan seluas 365.407 hektar, dan 48.839 hektar untuk perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi yang penting sebagai bagian dari koridor 'pengelolaan lahan'.

Kami telah mengembangkan pendekatan baru untuk penilaian valuasi sumberdaya alam yang akan menyelaraskan pedoman dan peraturan mengenai penilaian lahan di semua lembaga pemerintahan dan lembaga lain yang terkait, serta menghubungkannya dengan perencanaan tata ruang dan proses pembuatan kebijakan. Kombinasi antara Sistem Informasi Geografis (GIS), inventarisasi, pendekatan partisipatif, dan pendapat ahli adalah pendekatan yang paling efisien dan dapat diandalkan berdasarkan hasil integrasi antara metode valuasi ekonomi ekosistem hutan, seperti dijelaskan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 15/2012 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 98/PMK.06/2010 tentang penilaian aset sumber daya alam yang dimiliki oleh negara. Pendekatan ini akan direkomendasikan untuk penilaian valuasi sumberdaya alam pada tingkat kabupaten di Kalimantan Tengah di masa yang akan datang.